OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALSEL SERAHKAN HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK

Kamis, 12 Desember 2024 - kalsel

Elshinta.com - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kembali menyerahkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2024.

Penilaian yang mencakup pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, menjelaskan bahwa penilaian tahun ini melibatkan 3.771 responden dari Maret hingga November 2024.

Hasilnya, instansi pelayanan publik di Kalimantan Selatan mencatatkan skor rata-rata dalam zona hijau. Pencapaian tertinggi diraih oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut (99,57), Polres Hulu Sungai Selatan (96,64), dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (96,52).

"Kami menjalankan penilaian secara independen dan objektif. Terima kasih atas komitmen seluruh pihak yang terus meningkatkan pelayanan publik," ujar Hadi Rahman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Kamis (12/12).

Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

"Hasil ini mencerminkan upaya kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Komitmen ini akan terus kami jaga agar tidak ada warga yang kesulitan mengakses layanan," tuturnya.

Acara puncak berupa penganugerahan penghargaan, di mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh skor 94,58 dan menempati peringkat ke-9 nasional.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Kantor Pertanahan, Polres, dan pemerintah kabupaten/kota yang meraih nilai tertinggi.

Penilaian Ombudsman meliputi empat aspek utama: input (kompetensi dan sarana prasarana), proses (standar pelayanan), output (persepsi maladministrasi), dan pengelolaan pengaduan. Melalui evaluasi ini, diharapkan pelayanan publik di Kalimantan Selatan dapat terus menjadi contoh nasional dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi motivasi bagi instansi lainnya di Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat